



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PANCA LAUTANG
TAHUN 2025-2029**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KECAMATAN PANCA LAUTANG

JL. Bau Masepe No. 91 Telp. , Kode Pos 91681



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan Rencana Pembangunan dasar substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra

PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
12. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 2

- (1) Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan;
- d. Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan
- e. Bab V : Penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
- n. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- q. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- r. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- s. Dinas Sosial;
- t. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- v. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Dinas Perhubungan;
- aa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- cc. Kecamatan Maritengngae;
- dd. Kecamatan Panca Rijang;
- ee. Kecamatan Baranti;
- ff. Kecamatan Kulo;
- gg. Kecamatan Watang Sidenreng;
- hh. Kecamatan Dua Pitue;
- ii. Kecamatan Pitu Riawa;
- jj. Kecamatan Pitu Riase;
- kk. Kecamatan Tellu Limpoe;
- ll. Kecamatan Panca Lautang; dan
- mm. Kecamatan Watang Pulu.

(3) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

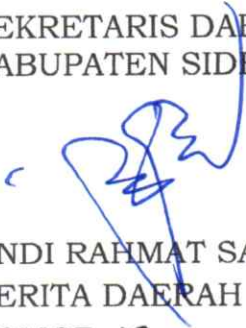
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI RAHMAT SALEH
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
NOMOR 18





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA LAUTANG
Jl. Bau Massepe No. 74 Amparita
SULAWESI - SELATAN

**KEPUTUSAN CAMAT PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 02 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2030
KECAMATAN PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Camat PANCA LAUTANG Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030 Tahun 2025 Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
10. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Lautang tahun 2018 – 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Bilokka
pada tanggal, 31 Januari 2025

**CAMAT PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



MUHAMMAD SAMIR, SKM., M.Kes
Pangkat : **Pembina Tk.I**
NIP. PANCA LAUTANG **19791231 19941 1 004**

Tembusan :

1. *Bupati Sidenreng Rappang, sebagai laporan;*
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang*
3. *Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang*
4. *Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang*
5. Pertinggal.-

Lampiran : Keputusan Camat Panca Lautang No. 2-Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030 Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng, tanggal 31 Januari 2025.

**Susunan Tim Penyusun
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030
Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	MUHAMMAD SAMIR, SKM., M.Kes	Camat Panca Lautang	Pengarah
2	HJ. GUMIATI LAOSI, S.Pd., M.Adm. Pemb	Sekcam	Ketua
3	SOLEHA, S.Sos	Kasubag. Perencanaan	Sekretaris
4	JUMIATI, SE. M.Si	Kasi. Pemerintahan	Anggota
5	HASNAWATI TOAHA, SE	Kasi. Pemberdayaan	Anggota
6	HJ. ADRIYANI, SE	Kasi. Pembangunan	Anggota
7	DARMAWATI, S.Sos	Kasi. Trantib	Anggota
8	HJ. SALMIAH, SH	Kasi. Pelayanan Umum	Anggota
9	NURLAILA, SE., M.Si	Kasubag. Umum & Kepegawaian	Anggota
10	MASHURI	Bendahara	Anggota Tim Sekretaris
11	SULTAN	Operator	Operator

**CAMAT PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

MUHAMMAD SAMIR, SKM., M.Kes
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19791231 19941 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Kecamatan Panca Lautang	19
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Panca Lautang	28
2.4 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	32
2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan	33
2.6 Mitra dalam Pemberian Pelayanan.....	33
2.7 Permasalahan, Isu Strategis Perangkat Daerah, Langkah Strategis dan Dan Mitigasi Risiko Perencanaan Strategi Kecamatan Panca Lautang.....	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Panca Lautang	38
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Panca Lautang	38
3.3 Strategi Renstra Kecamatan Panca Lautang.....	40
3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Panca Lautang.....	40
3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	41
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
4.1 Program Kecamatan Panca Lautang	43
4.2 Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Panca Lautang Penyelenggaraan dan Pendanaan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.....	43
4.3 Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Panca Lautang.....	59
4.4 Daftar Sub, Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang....	94
4.5 Indikator Kinerja Utama	94
4.6 Indikator Kinerja Kunci	95
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	30
Tabel 2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Panca Lautang.	31
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	39
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Kecamatan Panca Lautang	41
Tabel 3.5	Tehnik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Pemerintah Kab.Sidrap Kec. Panca Lautang	42
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	44
Tabel 4.2.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Panca Lautang	46
Tabel 4.3.	a. Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Panca Lautang	59
	b. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Panca Lautang	60
	c. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Perlokasi Dan Pendanaan	77
Tabel 4.4.	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Final Renstra Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.....	94
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama Final Renstra Kecamatan Panca Lautang	69
Tabel 4.6.	Idikator Kinerja Kunci Final Renstra Kecamatan Panca Lautang....	95

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan KaruniaNya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Panca Lautang Tahun 2025-2030 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan wujud kepedulian OPD dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah otonom. Selain itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Kecamatan Pancalautang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (RPJMD) tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang mengatur arah pembangunan Kecamatan Panca Lautang dalam jangka waktu lima tahun kedepan, memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

Kami berharap semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat, terutama sebagai sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Kecamatan Panca Lautang yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa selalu membimbing kita, Aamiin.

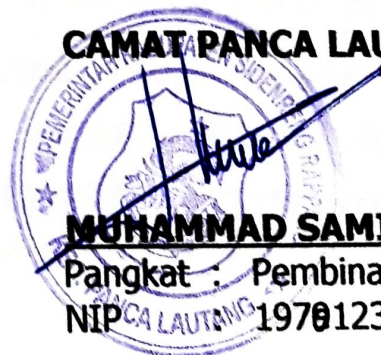
Bilokka, 9 September 2025

CAMAT PANCA LAUTANG

MUHAMMAD SAMIR, SKM., M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP 19701231 19941 1 004



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjabarkan arah dan strategi pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini terus mengalami transformasi yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran dan program kegiatan yang dilakukan tetapi lebih kepada efisiensi anggaran, efektifitas kebijakan maupun dalam pelayanan publik. Kecamatan sebagai simpul pelayanan masyarakat harus mampu merespon dinamika tersebut, sehingga mampu mewujudkan kinerja pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pelayanan prima.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 mengamanatkan

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tabaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Meengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322).
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawsei Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun kedepan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja Pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kantor Camat Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Sidenreng Rappang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka Panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang selama 5 tahun mendatang
5. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara Sistematis Renstra Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 terdiri dari:

BAB I. *PENDAHULUAN* terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. *GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH* beberapa bagian yaitu Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD, Sumberdaya PD, Kinerja Pelayanan PD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD dan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan dan Program , Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra, Telaahan RTRW dan KLHS, Penentuan Isu – isu Strategis.

BAB III. *TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN* terdiri atas beberapa bagian yaitu Tujuan dan Sasaran, Strategi Renstra ,Perangkat Daerah Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB IV. *PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN* terdiri dari enam program,

BAB V. *PENUTUP*

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Panca Lautang merupakan salah satu Kecamatan dari sebelas (11) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang, Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat, dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panca Lautang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Camat

- (1) Tugas Pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb :
 - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
 - c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
 - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
 - f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
 - h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
 - i. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - j. Mengoordinasikan kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
 - k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - l. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - n. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
 - p. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan disetiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan

(1) Tugas Pokok

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kecamatan.

(2) Fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, mamaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan kecamatan;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretriats Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program penyajian data dan informasi. Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

- (2) Tugas Pokok kepala bagian perencanaan dan keuangan adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran kecamatan;
 - h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan kecamatan;
 - i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja kecamatan;
 - k. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran kecamatan;
 - l. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan kecamatan;
 - m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan kecamatan;
 - n. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - p. Menyusun realisasi perhitungan anggaran kecamatan;
 - q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
 - r. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;

- s. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- t. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian pemeliharaan, inventaris dan penghapusan barang
- u. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memeberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.
- (2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi melaksanakan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatanagani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - j. Melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan

- k. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, pengajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- l. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat kecamatan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan,
- m. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- q. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kecamatan;
- r. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan. Kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- s. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- t. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
- u. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

(1) Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

(2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan sehingga berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) desa dan Kelurahan;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Memfasilitasi kerjasama antara desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
- k. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di pengadilan, pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum;
- m. Menginventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah negara tanah aset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- n. Memfasilitasi menyelesaikan sengketa batas desa/kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas desa/kelurahan;
- o. Memfasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten;
- p. Membantu camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pajak bumi dan bangunan, penerimaan/penagihan pajak/retribusi daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

4. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi: Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.
- (2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:
 - Menyusun rencana kegiatan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - a. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
 - b. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - c. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja di tingkat kecamatan;
 - h. Melakukan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
 - i. Melayani rekomendasi perijinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan Izin gangguan (HO)
 - j. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
 - k. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejolak sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insidentil secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musubah yang akan yang akan terjadi seperti bencana alam, tindakan kriminal, kecalakan lalu lintas dan lain-lain

- l. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
- m. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- n. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol)
- o. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

(1) Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pembangunan di tingkat kecamatan.

(2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pembangunan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pengembangan usaha perekonomian di tingkat kecamatan;

- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan pengembangan perekonomian desa/kelurahan di kecamatan;
- j. Melayani rekomendasi penerbitan perijinan bidang perekonomian dan pembangunan;
- k. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- l. Menyelenggarakan kegiatan diskusi musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi pelaksanaan musbang di tingkat desa/kelurahan;
- m. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA untuk jalan nasional, provinsi dan kabupaten;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

6. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(1) Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

(2) Tugas pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyusun program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- j. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

7. KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

(1) Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan persiapan penyelenggaraan tugas pelayanan umum di tingkat kecamatan.

(2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Umum sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pelayanan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan Umum kepada masyarakat di tingkat kecamatan;

- i. Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- j. Melayani rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian):
- k. Menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kecamatan;
- l. Melayani rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IBM), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar industri, izin industri, surat tempat usaha (SITU), izin pemasangan papan merek/reklame dan izin gudang;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- n. Merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan penataan keindahan lingkungan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- o. Mengusulkan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
- p. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penggunaan sarana dan prasarana umum masyarakat;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Lurah

Mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Kelurahan.
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan.
- d. Uraian tugas Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :
- e. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan.
- f. Melakukan pemberdayaan masyarakat.

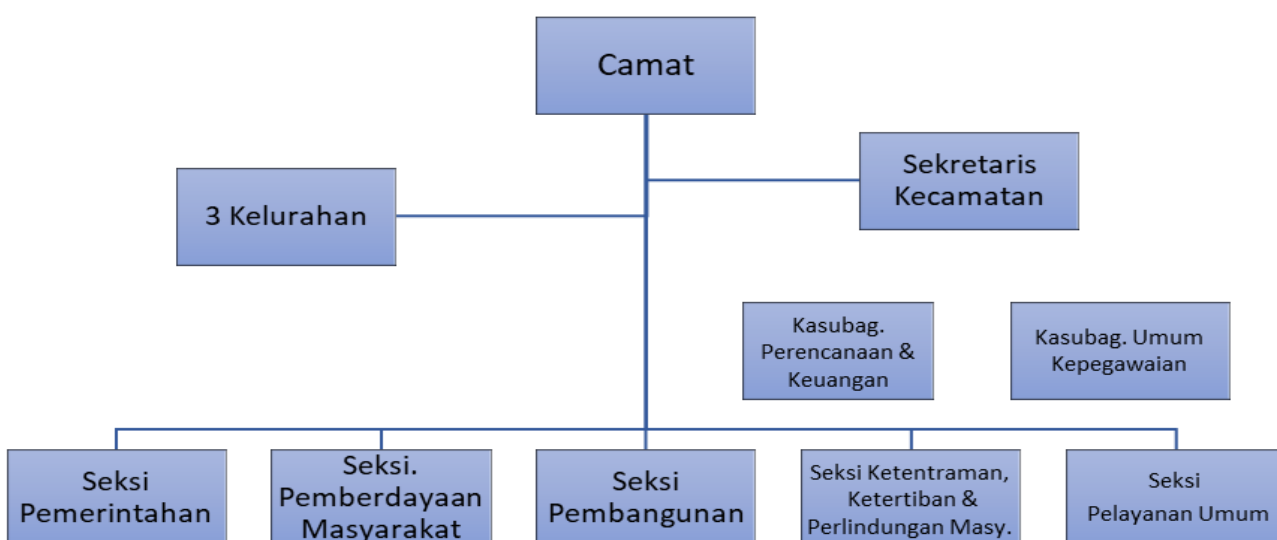
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- h. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- i. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

b. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Kecamatan Panca Lautang mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Panca Lautang



2.2. Sumber Daya Kecamatan Panca Lautang

a. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 23 orang, dengan perincian sebagai berikut:

- (1) Menurut jenis kelamin;
 - laki-laki : 7 orang
 - Perempuan : 15 orang
- (2) Menurut Pendidikan terakhir :
 - Pasca Sarjana (S2) : 5 orang
 - Sarjana (S1) : 12 orang
 - Sarjana Muda /D3 : - orang
 - S L T A : 5 orang

- (3) Menurut Pangkat/golongan :
- Golongan IV : 3 orang
 - Golongan III : 14 orang
 - Golongan II : 5 orang
 - Golongan I : - orang

- (4) Menurut Jabatan :
- Eselon II : - orang
 - Eselon III : 2 orang
 - Eselon IV : 16 orang
 - Pelaksana : 5 orang

- (5) Menurut Status Kepegawaian:
- P N S : 22 orang
 - PNS Titipan : - orang

b. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan personil seperti tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas kantor Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Nama Sarana & Prasana	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	2005	Baik	1	Tanah Rumah Jabatan Camat Panca Lautang
2	Tanah Bangunan Pertokoan/ Rumah/ Toko/ Koperasi	1960	Baik	1	Tanah KUD Lajonga (Dekat Lapangan)
3	Tanah Bangunan pertokoan/ Rumah Toko/ Koperasi	2005	Baik	1	Tanah KUD Kel.Wette'e
4	Tanah Bangunan Terminal Darat	2009	Baik	1	Tanah Terminal Mini, Dermaga dan Pelelangan Ikan Kel.Wette'e
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1960	Baik	1	Tanah Kantor Camat Panca Lautang
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1990	Baik	1	Tanah Kantor PKK Kec. Panca Lautang
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2005	Baik	1	Tanah Kantor Kel. Bilokka
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2005	Baik	1	Tanah Kantor Kelurahan Wette'e
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2005	Baik	1	Tanah Kantor Kel. Lajonga
10	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2005	Baik	1	Sport Centre Ex. SD Negeri 2 Bilokka
11	Tanah Bangunan Balai Sidang/ Pertemuan	2005	Baik	1	Tanah Balai Sidang Pertemuan Kel. Bilokka
12	Tanah Bangunan Balai Sidang/ Pertemuan	2005	Baik	1	Tanah Gedung Masyarakat Kel.Wette'e
13	Tanah Bangunan Balai Sidang/ Pertemuan	2007	Baik	1	Tanah Kantor PKK Wette'e
14	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2005	Baik	1	Desa Lise - Tanah TK Lise
15	Tanah Lapangan Tenis	2005	Baik	1	Tanah Play Centre Bilokka (Taman Bilokka)
16	Tanah Lapangan Sepak Bola	2005	Baik	1	Tanah Lapangan Sepak Bola Andi Sapada Kel. Lajonga
17	Tanah Lapangan Sepak Bola	2005	Baik	1	Tanah Lapangan Sepak Bola Kel. Wette'e
18	Tanah Lapangan Sepak Bola	2005	Baik	1	Lapangan Sepak Bola Andi Kalimong
19	Tanah Untuk Makam Pahlawan	1970	Baik	1	Tanah Taman Makam Pahlawan Kel. Bilokka

No	Nama Sarana & Prasana	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah	Keterangan
20	Tanah Untuk Makam Muslim	1970	Baik	1	Tanah Kuburan 3 Kel.Bilokka
21	Tanah Untuk Makam Umum	1970	Baik	1	Tanah Kuburan 2 Kel. Bilokka
22	Tanah Untuk Makam Umum	2005	Baik	1	Tanah Kuburan Kel. Wette'e
23	Tanah Untuk Makam lainnya	2005	Baik	1	Tanah Kuburan Kel. Lajonga
24	Pompa Air	2007	Baik	1	Dikantor Lurah
25	Pompa Air	2010	Kurang Baik	1	
26	Pompa Air	2013	Baik	1	Di Kantor Camat/Dinamo Sumur
27	Pompa Air	2021	Baik	1	BM KEL. WETTEE
28	Pick Up	2019	Baik	1	Pemakai BASRI (Desa Cenrana)
29	Pick Up	2019	Baik	1	Pemakai RUSNAH TAPPA (Desa Bapangi)
30	Sepeda Motor	2003	Kurang Baik	1	Pemakai HAERUL- Kadus Wanio Timoreng
31	Sepeda Motor	2007	Kurang Baik	1	Pemakai RUSDIEN (Rambo)
32	Sepeda Motor	2008	Kurang Baik	1	Pemakai BAHRI (Kades Lise)
33	Sepeda Motor	2008	Kurang Baik	1	Pemakai Basri kecamatan
34	Sepeda Motor	2009	Baik	1	Pemakai Hj.GUMIATI LAOSI S.Pd.M.Adm.Pem.
35	Sepeda Motor	2011	Baik	1	Pemakai MUH.BASRI - Lurah Bilokka
36	Sepeda Motor	2011	Kurang Baik	1	Pemakai LANCA - Kaling 1 Wette'e
37	Sepeda Motor	2011	Kurang Baik	1	Pemakai ARIFIN - Kaling 2 Bilokka
38	Sepeda Motor	2011	Kurang Baik	1	Pemakai TASWIN - Kaling 1 Lajonga
39	Sepeda Motor	2011	Kurang Baik	1	Pemakai H.P. BAHARUDDIN - Kaling 2 Lajonga
40	Sepeda Motor	2011	Kurang Baik	1	Pemakai ERNA DAMING - Kaling 2 Wette'e
41	Sepeda Motor	2014	Baik	1	Pemakai HASTINA, S.Sos - Lurah Wette'e
42	Sepeda Motor	2016	Baik	1	Hj. INARI, SE - Lurah Lajonga
43	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	1998	Rusak Berat	1	Rmh Mantan Lurah
44	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2013	Baik	1	
45	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2019	Baik	1	
46	Lemari Besi/Metal	1987	Kurang Baik	1	R.Lurah
47	Lemari Besi/Metal	2002	Kurang Baik	1	R.Pemerintahan
48	Lemari Besi/Metal	2021	Baik	1	LEMARI ARSIP, BM 2021 KEL. LAJONGA
49	Lemari Besi/Metal	2021	Baik	2	Lemari Arsip BM 2021 KEL.BILOKKA
50	Lemari Kayu	1987	Kurang Baik	1	Gudang
51	Lemari Kayu	2000	Kurang Baik	1	Gudang
52	Lemari Kayu	2007	Baik	1	
53	Lemari Kayu		Baik	1	Rumah Jabatan Camat P.Lautang
54	Rak Kayu		Kurang Baik	1	
55	Filing Cabinet Besi		Kurang Baik	1	
56	Lemari Kaca		Kurang Baik	1	
57	Lemari Makan		Baik	1	Dirumah Jabatan
58	LCD Projector/Infocus		Baik	1	Kantor Kel. Bilokka
59	LCD Projector/Infocus		Baik	1	

No	Nama Sarana & Prasana	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah	Keterangan
60	LCD Projector/Infocus		Baik	1	Sekretariat
61	LCD Projector/Infocus		Baik	1	Kantor lurah
62	Focusing Screen/Layar LCD Projector		Baik	1	BM 2021 kecamatan
63	Meja Kerja Kayu		Kurang Baik	1	Posyandu
64	Meja Kerja Kayu		Kurang Baik	3	Gudang
65	Meja Kerja Kayu		Kurang Baik	8	
66	Meja Kerja Kayu		Kurang Baik	1	Meja Tamu
67	Meja Kerja Kayu		Baik	1	
68	Kursi Besi/Metal		Kurang Baik	1	Gudang
69	Kursi Besi/Metal		Baik	11	
70	Kursi Besi/Metal		Baik	3	BM 2023
71	Kursi Kayu	2002	Kurang Baik	1	
72	Meja Rapat	2004	Kurang Baik	1	
73	Meja Rapat	2007	Baik	1	
74	Meja Rapat	2007	Baik	2	Kantor Camat
75	Meja Rapat	2019	Baik	1	
76	Meja Panjang	2000	Kurang Baik	1	
77	Meja Panjang	2000	Kurang Baik	2	Posyandu
78	Meja Panjang	2024	Baik	1	Aula
79	Meja Makan Besi	2009	Baik	1	Rumah Jabatan
80	Kursi Fiber Glas/Plastik	2022	Baik	20	Toko Resky, Kursi Plastik, BM 2022
81	Kursi Fiber Glas/Plastik	2022	Baik	23	Toko Resky Meubel, BM 2022
82	Kursi Rapat	2017	Baik	12	
83	Kursi Rapat	2018	Baik	5	
84	Kursi Rapat	2020	Baik	6	
85	Kursi Rapat	2021	Baik	4	BM 2021 KECAMATAN
86	Kursi Rapat	2021	Baik	11	BM 2021 KEL. WETTEE
87	Kursi Rapat	2021	Baik	1	Kursi Pejabat, BM 2021 KEL. LAJONGA
88	Kursi Rapat	2022	Baik	12	Toko Resky, Kursi Futura, BM 2022
89	Kursi Rapat	2022	Baik	12	Toko Resky Meubel, BM 2022
90	Kursi Rapat	2022	Baik	20	kursi rapat futura BM 2022
91	Kursi Tamu	2001	Kurang Baik	1	
92	Kursi Tamu	2004	Kurang Baik	1	
93	Kursi Tamu	2008	Baik	1	
94	Kursi Tamu	2020	Baik	2	
95	Kursi Putar	2003	Kurang Baik	1	Rujab
96	Kursi Putar	2006	Kurang Baik	1	Dikantor Lurah
97	Kursi Putar	2009	Kurang Baik	2	
98	Kursi Putar	2009	Baik	1	
99	Kursi Putar	2021	Baik	1	BM 2021 KEL. WETTEE
100	Kursi Putar	2022	Baik	1	Kursi Putar, BM 2022
101	Sofa	2011	Baik	1	
102	Sofa	2021	Baik	1	SOFA, BM 2021 KEL.LAJONGA
103	Lemari Es	2018	Baik	1	Rumah Jabatan Camat P.Lautang
104	Lemari Es	2021	Baik	1	BM 2021 KELURAHAN BILOKKA

No	Nama Sarana & Prasana	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah	Keterangan
105	Lemari Es	2023	Baik	1	BM 2023
106	A.C. Window	2003	Kurang Baik	1	
107	A.C. Window	2010	Baik	2	
108	A.C. Window	2011	Kurang Baik	1	
109	A.C. Split	2020	Baik	1	
110	A.C. Split	2021	Baik	1	BM 2021 KEL. WETTEE
111	A.C. Split	2021	Baik	2	BM 2021 KEL. BILOKKA
112	A.C. Split	2021	Baik	1	
113	A.C. Split	2022	Baik	1	belanja modal 2022
114	A.C. Split	2023	Baik	1	Bm 2023
115	A.C. Split	2024	Baik	2	Ruang Rapat Aula
116	Kipas Angin	2011	Baik	2	Dikantor Lurah
117	Kipas Angin	2011	Kurang Baik	4	
118	Kipas Angin	2011	Baik	1	
119	Kipas Angin	2013	Kurang Baik	2	
120	Kipas Angin	2017	Baik	2	
121	Kipas Angin	2018	Baik	1	Kantor Kel. Wette'e
122	Kipas Angin	2019	Baik	10	
123	Kipas Angin	2020	Baik	1	
124	Kipas Angin	2022	Baik	2	belanja modal 2022
125	Kipas Angin	2023	Baik	1	Bm 2023
126	Kompur Gas (Alat Dapur)	2019	Baik	1	
127	Kompur Gas (Alat Dapur)	2021	Baik	1	KOMPOR GAS, BM 2021 KEL. LAJONGA
128	Kompur Gas (Alat Dapur)	2021	Baik	1	BM 2021 KEL.BILOKKA
129	Televisi	2006	Kurang Baik	1	
130	Televisi	2011	Baik	2	
131	Televisi	2021	Baik	1	BM 2021 KELURAHAN BILOKKA
132	Televisi	2021	Baik	1	BM 2021 KEL. WETTEE
133	Televisi	2021	Baik	1	
134	Sound System	2011	Baik	1	
135	Sound System	2021	Baik	1	BM 2021 KEL. WETTEE
136	Wireless	2002	Baik	1	
137	Wireless	2011	Baik	1	Wirelles Kel. Bilokka
138	Wireless	2018	Baik	1	Kantor Kel. Bilokka
139	Wireless	2019	Baik	1	wireless
140	Dispenser	2023	Baik	1	BM 2023
141	Gordyin/Kray	2011	Kurang Baik	1	
142	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2007	Kurang Baik	6	
143	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2011	Baik	4	
144	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2013	Baik	4	
145	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2002	Kurang Baik	1	
146	Meja Kerja Pegawai NonStruktural	1998	Kurang Baik	1	
147	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1997	Kurang Baik	1	Diluar Ruangan
148	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2000	Kurang Baik	1	R. Lurah
149	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2006	Kurang Baik	2	
150	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2007	Baik	1	Kantor Lurah

No	Nama Sarana & Prasana	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah	Keterangan
151	Meja Rapat Pejabat lainnya	2002	Kurang Baik	1	
152	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2023	Baik	1	BM 2023
153	Kursi Kerja Pegawai NonStruktural	2007	Kurang Baik	1	
154	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2013	Baik	1	
155	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2000	Kurang Baik	3	Gudang
156	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2022	Baik	2	Toko Resky Meubel, BM 2022
157	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2022	Baik	2	belanja modal 2022
158	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2024	Baik	1	Ruang Pelayanan Umum
159	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota	2000	Kurang Baik	1	R.Tamu
160	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota	2002	Kurang Baik	1	
161	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2011	Baik	3	
162	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1983	Kurang Baik	1	
163	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1998	Kurang Baik	1	
164	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2002	Kurang Baik	3	Rujab
165	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2003	Baik	1	
166	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2007	Baik	5	
167	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2020	Baik	1	
168	Microphone/Wireless MIC	2019	Baik	1	
169	Stabilizer/UPS	2017	Kurang Baik	1	
170	Meja Kerja	2021	Baik	4	BM 2021 KELURAHAN BILOKKA
171	Meja Kerja	2022	Baik	1	Meja Kerja 1 Biro , BM 2022
172	P.C Unit	2011	Baik	1	
173	P.C Unit	2015	Baik	1	
174	P.C Unit	2021	Baik	4	belanja modal 2021 kecamatan
175	P.C Unit	2022	Baik	2	P.C. All In One Core i5, BM 2022
176	P.C Unit	2024	Baik	1	Ruang STAF Ernawati
177	Lap Top	2011	Baik	1	Hariato S.Sos
178	Lap Top	2011	Baik	1	
179	Lap Top	2013	Baik	1	
180	Lap Top	2017	Baik	1	
181	Lap Top	2019	Baik	2	
182	Lap Top	2020	Baik	4	
185	Lap Top	2021	Baik	4	belanja modal 2021 kecamatan
186	Lap Top	2021	Baik	1	BM 2021 KEL. LAJONGAN
187	Lap Top	2021	Baik	1	BM 2021 KELURAHAN BILOKKA
188	Note Book	2011	Baik	2	
189	Personal Komputer lainnya	2024	Baik	1	Ruang Bendahara Ajira Majid
190	CPU (Peralatan Mainframe)	2017	Baik	1	
191	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	Kurang Baik	1	
192	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	Baik	2	
193	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	Baik	1	
194	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	Baik	1	
195	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	Baik	5	
196	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Baik	2	
197	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	Baik	3	belanja modal 2021 kecamatan

No	Nama Sarana & Prasana	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah	Keterangan
198	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	Baik	1	BM 2021 KELLAJONGA
199	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	Baik	1	BM 2021 KEL. WETTEE
200	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	Baik	1	Printer Epson L3250, BM 2022
201	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	Baik	1	toko M.Fatih Computer, BM 2022
202	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Baik	2	BM 2023
203	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	Baik	1	Ruang Bendahara
204	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2005	Kurang Baik	1	Kantor Lurah
205	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2005	Kurang Baik	1	
206	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2005	Baik	1	
207	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2022	Baik	1	Pembangunan kantor Kecamatan Panca Lautang (Baru)
208	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1976	Baik	1	Kantor PKK
209	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	2005	Kurang Baik	1	Posyandu
210	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	2005	Baik	1	Posyandu
211	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2005	Rusak Berat	2	
212	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	2020	Baik	1	Pengadaan Bangunan Gedung Hiburan/ Kesenian Permanen (Panggung Seni) pada Kantor kelurahan Lajonga
213	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2010	Baik	1	Stadion Mini Panca Lautang (dispورا)
214	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	2005	Kurang Baik	1	KUD
215	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2015	Rusak Berat	1	Replikasi PAMSIMAS untuk 1 (Satu) Desa/ Kelurahan yaitu Kelurahan Wette' E Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap
216	Taman Permanen	2020	Baik	1	Pengadaan Jalan Khusus Pembangunan Taman Kota pada kantor Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang
217	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1996	Baik	1	Rumah Jabatan Camat
218	Makam Bersejarah	2020	Baik	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Taman Makam Pahlawan
219	Pagar Permanen	2005	Baik	1	Pembangunan Pagar
220	Pagar Permanen	2005	Baik	1	Pagar Rujab
221	Pagar Permanen	2011	Baik	1	Pagar
222	Pagar Permanen	2021	Baik	1	Pagar Kantor Kelurahan Bilokka
223	Jalan kota	2020	Baik	1	Pembangunan Talud Lingkungan Orai Salo pada Kelurahan Wette'E
224	Jalan kota	2020	Baik	1	Pembangunan Rabat Beton di Jl. Pekuburan, Kelurahan Lajonga
225	Jalan kota	2021	Baik	1	Penimbunan Jalan Kelurahan Wettee Bm 2021
225	Jalan Kota Lokal	2024	Baik	1	
226	Jalan Desa	2014	Baik	1	Desa Corawali – Di desa Corawali
227	Jalan Desa	2014	Baik	1	Desa Alesalewo - Penimbunan Jalan Dusun II
228	Jalan Desa	2014	Baik	1	Desa Cenrana - RABAT BETON (Jalan)

No	Nama Sarana & Prasana	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah	Keterangan
229	Jalan Khusus Lainnya	2009	Baik	1	Talud
230	Jalan Khusus Lainnya	2019	Baik	1	Pengadaan Jalan Khusus(Peningkatan Jalan Lingkungan) Kelurahan Lajonga
231	Jalan Khusus Lainnya	2019	Baik	1	Jalan Tani pada Kelurahan Wette'E
232	Jalan Khusus Lainnya	2019	Baik	1	talud lingkungan Cilellang dan Orai salo
233	Jalan Khusus Lainnya	2019	Baik	1	Jalan Khusus (Penimbunan/Peningkatan Jalan Tani) pada Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautang
234	Jembatan pada jalan kota	2020	Baik	1	Pembuatan Dekker Lingkungan Cilellang , pada Kelurahan Wette'E
235	Jembatan pada jalan kota	2020	Baik	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Pembangunan Duiker Kelurahan bilokka
236	Jembatan pada jalan kota	2020	Baik	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor (HOK Pembangunan Dekker) Pada Kelurahan Wette'E
237	Jembatan pada jalan kota	2021	Baik	1	PEKERJAAN Duekker KELURAHAN WETTEE. BM 2021
238	Jembatan pada jalan kota	2022	Baik	1	Duekker Pembuatan Dekker Lingk. I Lajonga , BM 2022
239	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	2022	Baik	1	Jembatan, BM 2022
240	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	2024	Baik	1	Deukker
241	Jembatan Pada Jalan Desa	2009	Baik	1	Duiker
242	Bangunan Waduk a Lain-lain	2009	Baik	1	Drainase
243	Bangunan Waduk a Lain-lain	2009	Baik	1	Jalan
244	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	2014	Baik	1	Desa Wanio - Pengerukan Saluran Irigasi Dusun Botto
245	Saluran Drainage	2014	Baik	1	Desa Wanio Timoreng - Desa Wanio Timoreng
246	Saluran Drainage	2015	Baik	1	Drainase Kelk. Lajonga
247	Saluran Drainage	2016	Baik	1	PEMBUATAN SALURAN DRAINASE
248	Saluran Drainage	2017	Baik	1	Drainase pada Kelurahan Bilokka
249	Saluran Drainage	2017	Baik	1	Pembuatan Drainase dan Timbunan Kelurahan Lajonga
250	Saluran Drainage	2017	Baik	1	Pembuatan Drainase dan Timbunan diLingkungan II Rijang Benteng, Kelurahan Lajonga
251	Saluran Drainage	2021	Baik	1	drainage kelurahan lajonga BM 2021
252	Saluran Drainage	2022	Baik	1	Drainase Lingk. Cilellang dan Orai Salo, BM 2022
253	Saluran Drainage	2022	Baik	1	Drainase Lingk. II Rijang Benteng, BM 2022
254	Bangunan Pengaman Pengembangan Lain-lain	2014	Baik	1	Desa Wanio - Penimbunan Jalan
255	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Air Bersih/ air Baku)	2017	Baik	1	Dekker pada Kelurahan Bilokka
256	Saluran Pembuang Air Buangan Domestik	2020	Baik	1	Pembangunan Drainase Desa Corawali Kecamatan Panca Lautang

No	Nama Sarana & Prasana	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah	Keterangan
257	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lain-lain	2014	Baik	1	Desa Cenrana – Dikantor desa/Pembuatan Dueker
258	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	2014	Baik	1	Desa Cenrana – Di kantor desa/Pengadaan jaringan Listrik Kantor Desa
259	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	2020	Baik	1	Pembangunan Lampu Jalan Kelurahan Lajonga untuk 9 titik
260	Jaringan DistribusiTegangan Dibawah 1 KVA	2020	Baik	1	Jaringan Lampu PJU Kecamatan Panca Lautang
261	Jaringan Distribusi Lain-lain	2019	Baik	1	Jaringan Listrik (Lampu Jalan) pada Kelurahan Bilokka
262	Jaringan Distribusi Lain-lain	2019	Baik	1	Jaringan Listrik (Pengadaan KWh/Meteran Lampu Jalan) pada Kelurahan Bilokka

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Panca Lautang

Sebagai SKPD yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Panca Lautang dalam pencapaian kinerja SKPD tidak bisa lepas dari kinerja pelayanan sebagai bagian dari tolok ukur pencapaian kinerja SKPD. Berikut disampaikan kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Panca Lautang.

a. Kondisi Umum Pelayanan Kecamatan Panca Lautang

1. Luas Wilayah

Kecamatan Panca Lautang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari : 3 Kelurahan dan 7 Desa yaitu Kelurahan Bilokka, Kelurahan Lajonga dan Kelurahan Wettee, Desa Corawali, Desa Bapangi, Desa Cenrana, Desa Lise, Desa Alesalewo, Desa Wanio, dan Desa Wanio Timoreng. Luas wilayah Kecamatan Panca Lautang 153,93 Km², berbatasan langsung dengan : Sebelah Utara Kecamatan Tellu Limpoe, Sebelah Timur Kabupaten Wajo, Sebelah Selatan Kabupaten Soppeng, serta Sebelah Barat Kabupaten Barru.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Panca Lautang pada tahun 2023 sebanyak 19.513 jiwa dengan komposisi 9.654 berjenis kelamin laki-laki dan 9.859 jiwa berjenis kelamin perempuan, dengan kepadatan penduduk per Km² sebesar 665 jiwa

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cenrana	454	411	865
2	Bapangi	934	890	1.824
3	Wanio Timoreng	1.147	1.160	2.307
4	Wanio	1.101	1.159	2.260
5	Bilokka	1.460	1.585	3.046
6	Carawali	1.169	1.185	2.354
7	Lise	1.213	1.244	2.457
8	Allesalewo	517	523	1.040
9	Lajonga	647	662	1.309
10	Wette	1.011	1.040	2.051
	Jumlah	9.654	9.859	19.513

(sumber : Kecamatan Panca Lautang Dalam Angka 2024).

Sebagai instansi yang mengemban tugas pemerintah, yang salah satunya dalam bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Panca Lautang dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, terutama menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti saat ini. Untuk itu Kecamatan Panca Lautang harus terus menerus melakukan

perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang maksimal. Dalam rangka perubahan tersebut Kecamatan Panca Lautang terus berbenah dan berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan merumuskan dan menetapkan suatu perencanaan strategis yang mempertimbangkan beberapa aspek yaitu : modal dasar (sumber daya manusia, IPTEK, dan peraturan perundangan yang mendukung), tantangan dan masalah yang dihadapi.

b. Kinerja Renstra Kecamatan Panca Lautang Periode 2020-2024

Realisasi anggaran Kecamatan Panca Lautang selama periode anggaran Tahun 2020-2024, seperti terlihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 1.PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PANCA LAUTANG
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenren Rappang**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	78	81,99	83,00	85,00	100	78,00	82,97	82,97	0	73,472	100	101,20	99,96	-	73,47
2	Predikat Nilai SAKIP	-	-	-	-	27,32 (C)	32,25 (C)	55,55 (C)	58,00 (CC)	-	27,32 (C)	47,65 (C)	48,75 (C)	51,4 (C)	-	100	147,75	87,76	51,4 (C)
3	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	100	100	50
4	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik	-	-	-	-	72	73	-	100	-	-	-	-	64,10	-	-	-	-	64,10
5	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang dijalankan dengan baik	-	-	-	-	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan	-	-	-	100	100	100	100	0	100	100	100	-	-	100	100	100,00	-	-
7	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina Dan Diawasi	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	-	-	100	100	100,00	-	-
8	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100,00	100	-
9	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	-	-	-	30	72	73	74	-	30	72	73	-	-	100	101,39	100,00	-	-
10	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100,00	100,00	-	-
11	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	89,71	96,58	100	100,00	100,00	89,71	96,58

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Panca Lautang.
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran Tahun Ke (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata2 Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	956.363.000	-	-	-	-	897.097.663	-	-	-	-	93,80	-	-	-	-	- 1	- 1
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	240.488.000	-	-	-	-	227.258.150	-	-	-	-	94,50	-	-	-	-	- 1	- 1
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	- 1	- 1
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.345.634.000	-	-	-	-	2.343.879.000	-	-	-	-	99,93	-	-	-	-	- 1	- 1
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	5.058.000	50.000.000	800.000	-	-	4.928.000	48.000.000	-	-	-	97,43	96,00	-	-	-
Program Penyelenggaraan Urusan Umum	-	-	-	-	80.000.000	-	-	-	-	67.982.000	-	-	-	-	84,98	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	1.143.910.000	1.235.574.500	454.770.000	473.124.000	-	1.096.710.000	1.011.180.500	454.140.000	472.014.000	-	95,87	81,84	100	100	-	-
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.944.000	787.500	-	-	-	7.609.000	-	-	-	-	95,78	-	-	-	-
XXX Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	4.112.385.900	3.917.036.500	2.573.447.500	2.648.676.000	-	3.971.733.207	3.654.262.727	2.260.048.381	2.553.056.973	-	96,58	93,29	87,82	96,39	-	-
JUMLA	3.554.485.000	5.256.295.900	5.165.613.000	3.079.005.000	3.202.600.000	3.480.234.813	5.068.443.207	4.677.980.227	2.762.188.381	3.093.052.973	97,91	96,43	0,56	9,71	6,58	- 0	- 0

2.4. Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Kantor Kecamatan Panca Lautang dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki beberapa indikator pelayanan yang dilaksanakan, baik yang direncanakan dan mendapatkan penganggaran maupun tidak direncanakan dan tidak mendapatkan penganggaran khusus.

Ada 8 (delapan) indikator kewilayahan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Panca Lautang dalam melaksanakan pelayanan dan untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Panca Lautang dapat dilihat dari Tabel berikut :

No	Unsur/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kewilayahan						
1	Tingkat Kepuasan masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78	81,99	82,00		73.472
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	-	-	-	100	50
3	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	%	100	100	100	100	-
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	%	100	100	100	0	0
5	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	0
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	30	72	73	36	72
7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	-	-	-	100	100
8	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	-	-	-	89.79	96.58

Secara umum indikator kinerja unsur Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Panca Lautang telah mencapai target dan tetap harus dipertahankan dan khusus untuk indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan belum tercapai dan perlu untuk ditingkatkan yang disebabkan oleh Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Panca Lautang dan kelurahan dalam menjalankan tugas, dan fungsinya masing – masing dan Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Desa/Kelurahan dimana faktor penentu keberhasilan dalam hal ini adalah Kualitas SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur, dan Kemampuan pelaksana kegiatan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.

2.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Panca Lautang Adalah Masyarakat diwilayah kecamatan Panca Lautang dengan jumlah penduduk 19.513 jiwa dengan luas wilayah $\pm 153,93$ Km².

2.6. Mitra dalam Pemberian Pelayanan.

Dalam pemberian layanan Kecamatan Panca Lautang dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Panca Lautang maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Panca Lautang antara lain:

- a. Polsek Panca Lautang untuk menyediakan layanan keamanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Koramil Panca Lautang untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Puskesmas Panca Lautang untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- d. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- e. Dispendukcapil mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- f. Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Panca Lautang.
- g. Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.

- h. UPT. Bapenda Kecamatan Panca lautang yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
- i. Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.7 Permasalahan, Isu Strategis Perangkat Daerah, Langkah Strategis Dan Mitigasi Risiko Perencanaan Strategis Kecamatan Panca Lautang.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi- filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

2.7.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Bertitik tolak dari pengertian permasalahan di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Panca Lautang, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Panca Lautang yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Kecamatan serta stakeholders sebagai berikut:

- Kurangnya pegawai di Kantor Kecamatan dan di tingkat desa.
- Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kantor Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.
- Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.

2.7.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Panca Lautang dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

2.7.3. Langkah Strategis & Mitigasi Risiko Perencanaan Strategis Kecamatan Panca Lautang

1. Permasalahan: Kurangnya Pegawai di Kantor Kecamatan dan Desa

► Risiko:

- Beban kerja tidak seimbang
- Terganggunya pelayanan publik
- Lambatnya pelaksanaan program

🌀 Strategi Mitigasi:

- Advokasi ke Pemerintah Kabupaten untuk penambahan ASN/P3K sesuai kebutuhan riil.
- Penguatan kapasitas SDM yang ada melalui pelatihan lintas fungsi (multi-tasking).
- Optimalisasi sistem digitalisasi layanan untuk menutupi keterbatasan tenaga manual.
- Kolaborasi dengan desa untuk skema kerja sama sharing pegawai administratif.

2. Permasalahan: Pelimpahan Kewenangan Tanpa Juklak/Juknis

► Risiko:

- Ketidakkonsistenan pelaksanaan program
-

- Kebingungan teknis aparatur kecamatan
- Potensi penyalahgunaan wewenang

🕒 Strategi Mitigasi:

- Inisiasi penyusunan juklak/juknis internal sementara berdasarkan peraturan perundangan yang ada.
- Koordinasi aktif dengan Pemkab untuk percepatan penerbitan regulasi teknis.
- Pelatihan dan sosialisasi kepada aparatur tentang batas dan ruang lingkup kewenangan.

3. Permasalahan: Lemahnya Pelayanan & Penilaian Kinerja Aparatur

➤ Risiko:

- Turunnya kepercayaan publik
- Tidak tercapainya target pelayanan minimum
- Rendahnya motivasi aparatur

🕒 Strategi Mitigasi:

- Penerapan sistem monitoring dan evaluasi (MONEV) berbasis indikator kinerja (KPI).
- Insentif berbasis kinerja (reward system).
- Pelatihan rutin dan benchmarking ke kecamatan lain yang lebih maju.
- Sistem pengaduan publik yang transparan untuk penilaian eksternal.

4. Permasalahan Lemahnya Koordinasi Pembinaan Aparatur Desa/ Kelurahan.

➤ Risiko:

- Tidak sinkronnya kebijakan Kabupaten di tingkat operasional
- Ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah

🕒 Strategi Mitigasi:

- Rapat koordinasi rutin bulanan/triwulan antara camat dan perangkat desa/kelurahan.
- Pembuatan pedoman teknis implementasi kebijakan Pemkab untuk aparatur desa.
- Pembentukan forum komunikasi kepala desa/kelurahan.

5. Permasalahan: Tidak Tersedianya Data Pembangunan yang Sistematis

➤ Risiko:

- Perencanaan tidak berbasis data (data driven)
- Program tidak tepat sasaran
- Tidak bisa mengukur capaian pembangunan

- 🕒 Strategi Mitigasi:
 - Pembangunan sistem informasi pembangunan kecamatan berbasis digital (SID/Kecamatan Dashboard).
 - Pendataan ulang terintegrasi dengan OPD terkait (Bappeda, Dinas Dukcapil, dll).
 - Pelatihan aparatur desa/kecamatan dalam manajemen data dan statistik dasar.
 - Kolaborasi dengan universitas atau lembaga riset lokal.

6. Permasalahan: Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Masih Rendah

- Risiko:
 - Program tidak sesuai kebutuhan masyarakat
 - Lemahnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan
 - Potensi konflik sosial

- 🕒 Strategi Mitigasi:
 - Revitalisasi forum Musrenbang (desa–kecamatan) agar lebih partisipatif.
 - Penguatan peran LPM, Karang Taruna, BPD, dan tokoh masyarakat sebagai jembatan komunikasi.
 - Sosialisasi aktif melalui media sosial, radio lokal, dan papan informasi desa.
 - Sistem polling/survey publik dalam perencanaan program prioritas.

📌 Kesimpulan Strategis

Untuk menghindari kegagalan perencanaan strategis, pendekatan yang diambil harus:

1. Berbasis data, bukan asumsi;
2. Terintegrasi antar unit kerja dan pemangku kepentingan;
3. Melibatkan masyarakat secara aktif;
4. Didukung SDM yang memadai dan berkinerja tinggi;
5. Memiliki regulasi pendukung yang jelas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Panca Lautang.

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Perumusan Tujuan pada Renstra Kecamatan Panca Lautang Tahun 2025-2029 mendasarkan pada isu strategis serta menyelaraskan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yaitu :

“ ***Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera*** ” Dan selaras dengan misi ke 6 (enam) yaitu “ ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi dan informasi digital***”

Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan Kecamatan Panca Lautang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan menetapkan tujuan jangka menengah yaitu “**Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan**” . Dalam hal ini Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat tercapai.

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Panca Lautang.

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam merumuskan sasaran strategis Renstra Kecamatan Panca Lautang diselaraskan dengan Sasaran 13 (tiga belas) RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu : **Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik**” Maka ditetapkan beberapa Sasaran Strategis Renstra Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum;
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan;
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan.

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2025- 2029 Kantor Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kerjanya disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG											
Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)	73,472	74,00	74,50	75,00	75,25	75,50	80,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dijalankan Dengan Baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Dijalankan Dengan Baik (%)	64	83	85	89	90	95	100	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik (%)	0	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai Sakip (Angka)	51,40	52,85	54,30	55,75	57,20	58,65	60,10	

3.3. Strategi Renstra Kecamatan Panca Lautang

Strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi didasarkan pada analisis yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang maka dirumuskan strategi pembangunan sebagai berikut :

- St.1. Penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi koordinasi lintas sektor, dan penerapan sistem pelayanan publik yang responsif dan terintegrasi.
- St.2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat, memperkuat sinergi program pemberdayaan, serta mengembangkan inovasi layanan yang responsif terhadap kebutuhan lokal untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- St.3. Meningkatkan efektivitas sistem pembinaan dan pengawasan melalui penguatan regulasi, kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan.
- St.4. Mengembangkan tata kelola kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi melalui penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan.

3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, prioritas pembangunan tahunan disusun secara bertahap, berkesinambungan, dan sistematis, mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prioritas ini dimaksudkan agar capaian kinerja setiap tahun dapat terukur dan mendukung pencapaian target akhir 5 tahunan. Untuk lebih jelasnya penahapan pembangunan Kecamatan Panca Lautang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2026)	TAHAP IV (2026)	TAHAP V (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

3.5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah serangkaian prioritas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan, selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan strategi dan kebijakan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Penetapan strategi dan kebijakan menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta dalam pelaksanaannya.

Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki strategi dalam mencapai sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif dan Efisien
- b. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat dan Pelayanan Masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan
- d. Mengembangkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi

Untuk lebih jelasnya, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Musrenbang Renstra Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum	Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik	Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai aturan yang telah ditetapkan/berlaku	
2	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan Masyarakat		Melaksanakan, memfasilitasi dan mengkoordinasi tentang tugas umum pemerintahan, dalam pemberdayaan masyarakat	
3	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan		Melaksanakan pembinaan aparatur desa tentang tata kelola pemerintahan desa dan administrasi keuangan yang baik dan benar	
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan		Penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi serta Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGRAAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, kegiatan merupakan intermedit program yang menjadi penjabaran program sedangkan sub kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

4.1. Program Kecamatan Panca Lautang.

Perencanaan program terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

1. Program Pencapaian Sasaran Strategis

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Program Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAPHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					3.766.088.000,00		3.804.623.600,00		3.851.297.590,00		3.852.433.926,00		3.880.097.776,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.302.823.000,00		3.339.999.600,00		3.385.673.590,00		3.385.809.926,00		3.413.371.776,00	
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.302.823.000,00	100	3.339.999.600,00	100	3.385.673.590,00	100	3.385.809.926,00	100	3.413.371.776,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00	
Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	2.222.000,00	100	3.222.000,00	100	3.222.000,00	100	3.222.000,00	100	3.222.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					408.714.000,00		409.402.000,00		409.402.000,00		409.402.000,00		409.402.000,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100	100	100	408.714.000,00	100	409.402.000,00	100	409.402.000,00	100	409.402.000,00	100	409.402.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					979.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.102.000,00	
Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	979.000,00	100	500.000,00	100	750.000,00	100	1.000.000,00	100	1.102.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					1.350.000,00		1.500.000,00		2.250.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	1.350.000,00	100	1.500.000,00	100	2.250.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					3.766.088.000		3.804.623.600,00		3.851.297.590,00		3.852.433.926,00		3.880.097.776,00	

4.2. Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Panca Lautang

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG								
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)			
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dijalankan Dengan Baik (%)			
			Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan			Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya kualitas tata kelola kinerja dan keuangan			Predikat Nilai Sakip (Angka)		
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terseleggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dijalankan Dengan Baik (%)		
			Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik				
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat				
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan			Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik (%)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				
		Meningkatnya kualitas tata kelola kinerja dan keuangan			Predikat Nilai Sakip (Angka)		
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.,
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN WETTE							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dijalankan Dengan Baik (%)		
					Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik		
					Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan		
					Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat		
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan			Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik (%)		
					Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan		
				Meningkatnya kualitas tata kelola kinerja dan keuangan			Predikat Nilai Sakip (Angka)
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LAJONGA								
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)			
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dijalankan Dengan Baik (%)			
			Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik					
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan					
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat					
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan			Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik (%)			
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan					
		Meningkatnya kualitas tata kelola kinerja dan keuangan			Predikat Nilai Sakip (Angka)			
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan					

4.3. a. Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Panca Lautang

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH FINAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	73,472	74,00	74,50	75,00	75,25	75,50	80,00	
2	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dijalankan Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Dijalankan Dengan Baik	%	64	83	85	89	90	95	100	
4	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik	%	0	100	100	100	100	100	100	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	

b. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Panca Lautang

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.766.088.000,00		3.804.623.600,00		3.851.297.590,00		3.852.433.926,00		3.880.097.776,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.302.823.000,00		3.339.999.600,00		3.385.673.590,00		3.385.809.926,00		3.413.371.776,00		
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	3.302.823.000,00	100	3.339.999.600,00	100	3.385.673.590,00	100	3.385.809.926,00	100	3.413.371.776,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.100.000,00		2.400.000,00		3.000.000,00		
Tersedian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.100.000,00	2	2.400.000,00	2	3.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.050.000,00		1.200.000,00		1.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.050.000,00	2	1.200.000,00	2	1.500.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.050.000,00		1.200.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.050.000,00	2	1.200.000,00	2	1.500.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.278.016.000,00		2.323.551.600,00		2.317.957.590,00		2.389.361.929,00		2.399.025.776,00		
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	742	14	2.278.016.000,00	742	2.323.551.600,00	742	2.317.957.590,00	742	2.389.361.929,00	742	2.399.025.776,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.278.016.000,00		2.323.551.600,00		2.317.957.590,00		2.389.361.929,00		2.399.025.776,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	742	14	2.278.016.000,00	742	2.323.551.600,00	742	2.317.957.590,00	742	2.389.361.929,00	742	2.399.025.776,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				323.685.000,00		354.620.500,00		346.079.500,00		339.089.500,00		350.689.500,00		
Terseleenggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	246	313	323.685.000,00	313	354.620.500,00	313	346.079.500,00	313	339.089.500,00	313	350.689.500,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	220	220		220		220		220		220			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	29		29		14		3		28			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	90	90		90		90		90		90			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	105.363	105.363		105.363		105.363		105.363		105.363			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.088.000,00		20.088.000,00		20.088.000,00		20.088.000,00		20.088.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	220	220	20.088.000,00	220	20.088.000,00	220	20.088.000,00	220	20.088.000,00	220	20.088.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				133.056.000,00		143.112.000,00		134.561.000,00		127.561.000,00		139.061.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	29	133.056.000,00	29	143.112.000,00	14	134.561.000,00	3	127.561.000,00	28	139.061.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.518.000,00		28.518.000,00		28.518.000,00		28.518.000,00		28.518.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	90	90	28.518.000,00	90	28.518.000,00	90	28.518.000,00	90	28.518.000,00	90	28.518.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.461.000,00		18.755.500,00		18.755.500,00		18.755.500,00		18.755.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	105.363	105.363	18.461.000,00	105.363	18.755.500,00	105.363	18.755.500,00	105.363	18.755.500,00	105.363	18.755.500,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				1.410.000,00		1.380.000,00		1.390.000,00		1.400.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	1.410.000,00	12	1.380.000,00	12	1.390.000,00	12	1.400.000,00		1.500.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				122.152.000,00		142.767.000,00		142.767.000,00		142.767.000,00		142.767.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	246	313	122.152.000,00	313	142.767.000,00	313	142.767.000,00	313	142.767.000,00	313	142.767.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				62.084.000,00		0,00		0,00		12.084.000,00		0,00		
Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	62.084.000,00	0	0,00	0	0,00	10	12.084.000,00	0	0,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				62.084.000,00		0,00		0,00		12.084.000,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	62.084.000,00	0	0,00	0	0,00	10	12.084.000,00	0	0,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				340.758.000,00		322.572.500,00		322.572.500,00		322.572.500,00		322.572.500,00		
Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	70	48	340.758.000,00	48	322.572.500,00	48	322.572.500,00	48	322.572.500,00	48	322.572.500,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	50	48		48		48		48		48			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	56	48		48		48		48		56			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.836.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	70	48	1.836.000,00	48	1.650.000,00	48	1.650.000,00	48	1.650.000,00	48	1.650.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	56	48	41.000.000,00	48	41.000.000,00	48	41.000.000,00	48	41.000.000,00	56	41.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				297.922.000,00		279.922.500,00		279.922.500,00		279.922.500,00		279.922.500,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	50	48	297.922.000,00	48	279.922.500,00	48	279.922.500,00	48	279.922.500,00	48	279.922.500,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				296.280.000,00		337.255.000,00		396.964.000,00		320.301.997,00		338.084.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		20	296.280.000,00		337.255.000,00		396.964.000,00		320.301.997,00		338.084.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	56		8		8		8		8			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				37.096.000,0 0		40.280.000,00		40.280.000,0 0		40.280.000,0 0		40.280.000,0 0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		20	37.096.000,0 0		40.280.000,00		40.280.000,0 0		40.280.000,0 0		40.280.000,0 0		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.184.000,00		4.186.000,00		4.186.000,00		4.186.000,00		4.186.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	56	9.184.000,00	8	4.186.000,00	8	4.186.000,00	8	4.186.000,00	8	4.186.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000,00		292.789.000,0 0		352.498.000,0 00		275.835.997,00		293.618.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	250.000.000,00	1	292.789.000,0 0	1	352.498.000,0 00	1	275.835.997,00	1	293.618.000,00		
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA	
													7.01.0.00.0.00.01.0002 - KEL. WETTE	
													7.01.0.00.0.00.01.0003 - KEL. LAJONGA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00		
Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	2.222.000,00	100	3.222.000,00	100	3.222.000,00	100	3.222.000,00	100	3.222.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				2.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00		
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	0	2.222.000,00	12	3.222.000,00	12	3.222.000,00	12	3.222.000,00	12	3.222.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	12		12		12		12					
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	0	0,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				1.212.000,00		1.212.000,00		1.212.000,00		1.212.000,00		1.212.000,00						
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	12	1.212.000,00	12	1.212.000,00	12	1.212.000,00	12	1.212.000,00	12	1.212.000,00						
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1.010.000,00		1.010.000,00		1.010.000,00		1.010.000,00		1.010.000,00						
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	12	1.010.000,00	12	1.010.000,00	12	1.010.000,00	12	1.010.000,00	12	1.010.000,00						
Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA					
																	7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN WETTE	
																		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LAJONGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				408.714.000,00		409.402.000,00		409.402.000,00		409.402.000,00		409.402.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100	100	408.714.000,00	100	409.402.000,00	100	409.402.000,00	100	409.402.000,00	100	409.402.000,00	7.01.0.00.0.00 .01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		
Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				407.614.000,00		408.302.000,00		408.302.000,00		408.302.000,00		408.302.000,00		
Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	8	407.614.000,00	8	408.302.000,00	8	408.302.000,00	8	408.302.000,00	8	408.302.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	60	0		0		0		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	36	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				987.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	8	987.000,00	8	1.100.000,00	8	1.100.000,00	8	1.100.000,00	8	1.100.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				406.102.000,00		406.102.000,00		406.102.000,00		406.102.000,00		406.102.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	36	12	406.102.000,00	12	406.102.000,00	12	406.102.000,00	12	406.102.000,00	12	406.102.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				525.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	525.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				408.714.000,00		409.402.000,00		409.402.000,00		409.402.000,00		409.402.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA	
							7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN WETTE							
							7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LAJONGA							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				979.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.102.000,00		
Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	979.000,00	100	500.000,00	100	750.000,00	100	1.000.000,00	100	1.102.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				979.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.102.000,00		
Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	979.000,00	1	500.000,00	1	750.000,00	1	1.000.000,00	1	1.102.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		1											
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				479.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.102.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	479.000,00	1	500.000,00	1	750.000,00	1	1.000.000,00	1	1.102.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		1	500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA	
							7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN WETTE							
							7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LAJONGA							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA	
													7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN WETTE	
													7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LAJONGA	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				1.350.000,00		1.500.000,00		2.250.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	1.350.000,00	100	1.500.000,00	100	2.250.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				1.350.000,00		1.500.000,00		2.250.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	1	1.350.000,00	1	1.500.000,00	1	2.250.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				450.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	1	450.000,00	1	500.000,00	1	750.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa				450.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (Dokumen)	0	1	450.000,00	1	500.000,00	1	750.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				450.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	1	450.000,00	1	500.000,00	1	750.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA	
													7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN WETTE	
													7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LAJONGA	

c. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Per Lokasi Dan Pendanaan

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
7.01 - KECAMATAN					3.766.088.000,00		3.804.623.600,00		3.851.297.590,00		3.852.433.926,00		3.880.097.776,00			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.302.823.000,00		3.339.999.600,00		3.385.673.590,00		3.385.809.926,00		3.413.371.776,00			
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.302.823.000,00	100	3.339.999.600,00	100	3.385.673.590,00	100	3.385.809.926,00	100	3.413.371.776,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000,00		2.000.000,00		2.100.000,00		2.400.000,00		3.000.000,00			
Tersedian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.100.000,00	2	2.400.000,00	2	3.000.000,00			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		2		2		2		2		2				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.000.000,00		1.000.000,00		1.050.000,00		1.200.000,00		1.500.000,00		Panca Lautang	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.050.000,00	2	1.200.000,00	2	1.500.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1.000.000,00		1.000.000,00		1.050.000,00		1.200.000,00		1.500.000,00		Panca Lautang	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.050.000,00	2	1.200.000,00	2	1.500.000,00			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.278.016.000,00		2.323.551.600,00		2.317.957.590,00		2.389.361.929,00		2.399.025.776,00			
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	742	742	14	2.278.016.000,00	742	2.323.551.600,00	742	2.317.957.590,00	742	2.389.361.929,00	742	2.399.025.776,00			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.278.016.000,00		2.323.551.600,00		2.317.957.590,00		2.389.361.929,00		2.399.025.776,00		Panca Lautang	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	742	742	14	2.278.016.000,00	742	2.323.551.600,00	742	2.317.957.590,00	742	2.389.361.929,00	742	2.399.025.776,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.					
			2025	2026		2027		2028		2029		2030									
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU								
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					323.685.000,00		354.620.500,00		346.079.500,00		339.089.500,00		350.689.500,00								
Terseleggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	220	220	220	323.685.000,00	220	354.620.500,00	220	346.079.500,00	220	339.089.500,00	220	350.689.500,00								
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	105.363	105.363	105.363		105.363		105.363		105.363		105.363		105.363	105.363	105.363					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	246		313		313		313		313		313		313	313	313					
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	12		12		12		12		12		12	12						
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	90	90	90		90		90		90		90		90	90	90	90	90			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14	29		29		29		14		3		28							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.088.000,00		20.088.000,00		20.088.000,00		20.088.000,00		20.088.000,00		Panca Lautang	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	220	220	220	20.088.000,00	220	20.088.000,00	220	20.088.000,00	220	20.088.000,00	220	20.088.000,00			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					133.056.000,00		143.112.000,00		134.561.000,00		127.561.000,00		139.061.000,00		Panca Lautang	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14	29	133.056.000,00	29	143.112.000,00	14	134.561.000,00	3	127.561.000,00	28	139.061.000,00			
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					28.518.000,00		28.518.000,00		28.518.000,00		28.518.000,00		28.518.000,00		Panca Lautang	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	90	90	90	28.518.000,00	90	28.518.000,00	90	28.518.000,00	90	28.518.000,00	90	28.518.000,00			
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					18.461.000,00		18.755.500,00		18.755.500,00		18.755.500,00		18.755.500,00		Panca Lautang	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	105.363	105.363	105.363	18.461.000,00	105.363	18.755.500,00	105.363	18.755.500,00	105.363	18.755.500,00	105.363	18.755.500,00			
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					1.410.000,00		1.380.000,00		1.390.000,00		1.400.000,00		1.500.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	12	1.410.000,00	12	1.380.000,00	12	1.390.000,00	12	1.400.000,00		1.500.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					122.152.000,00		142.767.000,00		142.767.000,00		142.767.000,00		142.767.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	246		313	122.152.000,00	313	142.767.000,00	313	142.767.000,00	313	142.767.000,00	313	142.767.000,00			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					62.084.000,00		0,00		0,00		12.084.000,00		0,00			
Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		10	62.084.000,00	0	0,00	0	0,00	10	12.084.000,00	0	0,00			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					62.084.000,00		0,00		0,00		12.084.000,00		0,00		Panca Lautang	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		10	62.084.000,00	0	0,00	0	0,00	10	12.084.000,00	0	0,00			
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					340.758.000,00		322.572.500,00		322.572.500,00		322.572.500,00		322.572.500,00			
Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	56		48	340.758.000,00	48	322.572.500,00	48	322.572.500,00	48	322.572.500,00	56	322.572.500,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	50		48		48		48		48						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	70	70	48		48		48		48						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.0 8.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.836.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	70	70	48	1.836.000,00	48	1.650.000,00	48	1.650.000,00	48	1.650.000,00	48	1.650.000,00			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		Panca Lautang	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	56		48	41.000.000,00	48	41.000.000,00	48	41.000.000,00	48	41.000.000,00	56	41.000.000,00			
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					297.922.000,00		279.922.500,00		279.922.500,00		279.922.500,00		279.922.500,00		Panca Lautang	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	50		48	297.922.000,00	48	279.922.500,00	48	279.922.500,00	48	279.922.500,00	48	279.922.500,00			
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					296.280.000,00		337.255.000,00		396.964.000,00		320.301.997,00		338.084.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		56	296.280.000,00	8	337.255.000,00	8	396.964.000,00	8	320.301.997,00	8	338.084.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			20												
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					37.096.000,00		40.280.000,00		40.280.000,00		40.280.000,00		40.280.000,00		Panca Lautang	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			20	37.096.000,00		40.280.000,00		40.280.000,00		40.280.000,00		40.280.000,00			
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.184.000,00		4.186.000,00		4.186.000,00		4.186.000,00		4.186.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		56	9.184.000,00	8	4.186.000,00	8	4.186.000,00	8	4.186.000,00	8	4.186.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					250.000.000,00		292.789.000,00		352.498.000,00		275.835.997,00		293.618.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	1	250.000.000,00	1	292.789.000,00	1	352.498.000,00	1	275.835.997,00	1	293.618.000,00			
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan					0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA		
														7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN WETTE		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00			
Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	2.222.000,00	100	3.222.000,00	100	3.222.000,00	100	3.222.000,00	100	3.222.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					2.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00			
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	12	12	2.222.000,00	12	3.222.000,00	12	3.222.000,00	12	3.222.000,00	12	3.222.000,00			
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	0	0		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	0	0	0,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00			
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					1.212.000,00		1.212.000,00		1.212.000,00		1.212.000,00		1.212.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	12	12	1.212.000,00	12	1.212.000,00	12	1.212.000,00	12	1.212.000,00	12	1.212.000,00			
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1.010.000,00		1.010.000,00		1.010.000,00		1.010.000,00		1.010.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	12	12	1.010.000,00	12	1.010.000,00	12	1.010.000,00	12	1.010.000,00	12	1.010.000,00			
Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik					0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA		
														7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN WETTE		
														7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LAJONGA		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					408.714.000,00		409.402.000,00		409.402.000,00		409.402.000,00		409.402.000,00			
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100	100	100	408.714.000,00	100	409.402.000,00	100	409.402.000,00	100	409.402.000,00	100	409.402.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00			
Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		Panca Lautang	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					407.614.000,00		408.302.000,00		408.302.000,00		408.302.000,00		408.302.000,00				
Tertaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0		1	407.614.000,00	1	408.302.000,00	1	408.302.000,00	1	408.302.000,00	1	408.302.000,00				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0		8		8		8		8		8					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	36	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	60	0	0		0		0		0		0		0	0		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					987.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		Panca Lautang		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0		8	987.000,00	8	1.100.000,00	8	1.100.000,00	8	1.100.000,00	8	1.100.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					406.102.000,00		406.102.000,00		406.102.000,00		406.102.000,00		406.102.000,00		Panca Lautang	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	36	12	12	406.102.000,00	12	406.102.000,00	12	406.102.000,00	12	406.102.000,00	12	406.102.000,00			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	60	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan					525.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0		1	525.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00			
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan					0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA		
														7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN WETTE		
														7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LAJONGA		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					979.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.102.000,00			
Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	979.000,00	100	500.000,00	100	750.000,00	100	1.000.000,00	100	1.102.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					979.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.102.000,00			
Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)			1	979.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.102.000,00			
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1				
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					479.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.102.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	1	479.000,00	1	500.000,00	1	750.000,00	1	1.000.000,00	1	1.102.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Blokka	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)			1	500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah					979.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.102.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA		
						7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN WETTE										
						7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LAJONGA										
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.				
			2025	2026		2027		2028		2029		2030								
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Panca Lautang , Bilokka					
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00							
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA						
																		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN WETTE		
																			7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LAJONGA	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					1.350.000,00		1.500.000,00		2.250.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00							
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	1.350.000,00	100	1.500.000,00	100	2.250.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG						
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1.350.000,00		1.500.000,00		2.250.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	0	1	1.350.000,00	1	1.500.000,00	1	2.250.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					450.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	0	1	450.000,00	1	500.000,00	1	750.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					450.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	0	1	450.000,00	1	500.000,00	1	750.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					450.000,00		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	0	1	450.000,00	1	500.000,00	1	750.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan					0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA		
														7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN WETTE		
														7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LAJONGA		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	Nihil			

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	73,472	74,00	74,50	75,00	75,25	75,50	80,00	
3.	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dijalankan Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Dijalankan Dengan Baik	%	64	83	85	89	90	95	100	
5.	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik	%	0	100	100	100	100	100	100	
6.	Predikat Nilai Sakip	Angka	51,40	52,85	54,30	55,75	57,20	58,65	60,10	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	STATUS	SAT.	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2029 yaitu **“Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”**. Visi ini kemudian dijabarkan menjadi 7 (tujuh) misi strategis yang mencakup pengembangan struktur perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia yang inklusif, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pembinaan kehidupan sosial yang kondusif, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan pengembangan infrastruktur. Visi dan Misi ini yang kemudian menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam mengelola program dan kegiatan yang relevan dan terukur.

Keselaran visi dan misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025- 2029 dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi Sulawesi Selatan dan nasional merupakan aspek krusial dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang berjenjang dan terintegrasi, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang telah dirancang dengan memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2025—2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Lautang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Panca Lautang dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Panca Lautang sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Lautang merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Panca Lautang ;
3. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Lautang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kantor Kecamatan Panca Lautang
4. Kantor Kecamatan Panca Lautang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Lautang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Lautang ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.

